Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4939-4951
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4939-4951
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Strategi Peningkatan Keakuratan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai Upaya Peningkatan Nilai IKPA pada IAIN Parepare

Syarifuddin[1], Tamsil Hadi[2], Nining Artianasari Sulaiman[3]
[1,2,3] Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia
Email : tamsil.hadi@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di IAIN Parepare, khususnya pada indikator deviasi RPD Halaman III DIPA. Ketidaksesuaian antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi belanja sering menjadi kendala utama dalam mencapai nilai IKPA yang sempurna. Melalui pendekatan pendampingan teknis dan evaluasi periodik, strategi ini diharapkan mampu menyelaraskan kalender kegiatan dengan arus kas instansi. Hasil yang diharapkan adalah penurunan persentase deviasi RPD dan meningkatnya efisiensi manajerial keuangan di lingkungan IAIN Parepare.
Kata Kunci: Akurasi Anggaran, IAIN Parepare, IKPA, Manajemen Keuangan Publik, RPD.

Abstract

This service-oriented research aims to optimize the Budget Execution Performance Indicator (IKPA) score at IAIN Parepare, specifically regarding the deviation in the Fund Withdrawal Plan (RPD) as outlined in Section III of the Budget Implementation List (DIPA). Discrepancies between planned fund withdrawals and actual expenditures often serve as the primary obstacle to achieving a perfect IKPA score. Through a strategy involving technical assistance and periodic evaluations, it is expected that the institution's activity calendar can be better aligned with its cash flow. The anticipated outcomes include a reduction in the RPD deviation percentage and enhanced efficiency in financial management within IAIN Parepare.
Keywords: *Budget Accuracy, IAIN Parepare, IKPA (Budget Implementation Performance Indicator), Public Financial Management, RPD (Budget Execution Plan).*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, efektif, dan transparan merupakan amanat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai institusi pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama, IAIN Parepare berkewajiban untuk tidak hanya menyerap anggaran secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas belanja yang akuntabel. Tolok ukur utama dalam menilai kualitas pelaksanaan anggaran tersebut direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA didefinisikan sebagai alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari empat aspek utama: kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Salah satu tantangan krusial dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal di IAIN Parepare terletak pada indikator Deviasi Halaman III DIPA, yang mengukur tingkat keakuratan Rencana Penarikan Dana (RPD). Merujuk pada aturan teknis penilaian IKPA terbaru, RPD merupakan instrumen vital bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan kas (*cash planning*) nasional. Ketidaksesuaian antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi belanja sering menjadi kendala utama; jika deviasi antara rencana dan realisasi melampaui ambang batas yang ditentukan (rata-rata di atas 5%), maka nilai IKPA satuan kerja akan terkoreksi secara otomatis. Data evaluasi kinerja anggaran menunjukkan bahwa tidak maksimalnya capaian nilai total IKPA IAIN Parepare secara konsisten disebabkan oleh rendahnya nilai pada indikator RPD, yang kerap mengalami deviasi melampaui batas toleransi yang ditetapkan.

Kondisi faktual di IAIN Parepare menunjukkan bahwa fluktuasi deviasi masih sering terjadi. Hal ini umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama: *pertama,* kurangnya koordinasi antara unit kerja (Fakultas/Lembaga) dengan bagian keuangan dalam menyinkronkan jadwal kegiatan dengan arus kas. *Kedua,* perubahan jadwal kegiatan akademik maupun non-akademik tanpa diikuti penyesuaian administratif RPD mengakibatkan nilai deviasi membengkak, sehingga performa indikator ini selalu menjadi titik lemah yang menggerus total nilai IKPA institusi secara keseluruhan. *Ketiga,* ketidakdisiplinan dalam melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA pada awal triwulan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Rendahnya akurasi RPD tidak hanya berdampak negatif pada penilaian kinerja satker, tetapi juga mencerminkan lemahnya perencanaan manajerial. Tanpa adanya strategi peningkatan keakuratan RPD yang komprehensif melalui pendekatan pendampingan teknis dan evaluasi periodik, target IAIN Parepare dalam meraih nilai IKPA yang unggul akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pengabdian ini hadir untuk menyusun mekanisme koordinasi yang lebih solid guna memastikan setiap rencana penarikan dana selaras dengan realisasi di lapangan, demi terciptanya efisiensi manajerial keuangan yang berkelanjutan.

FOKUS PENGABDIAN

Fokus utama dari pengabdian ini adalah mentransformasi tata kelola perencanaan kas di lingkungan IAIN Parepare dari model administratif pasif menjadi model koordinatif aktif. Secara spesifik, pengabdian ini akan memusatkan perhatian pada tiga pilar utama:

1. Sinkronisasi dan Harmonisasi Kalender Kegiatan: Pengabdian ini berfokus pada penyelarasan jadwal kegiatan akademik dan non-akademik di setiap Fakultas, Lembaga, dan Unit Kerja dengan Halaman III DIPA. Fokus ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rencana penarikan dana tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi merupakan cerminan riil dari kesiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SAKTI dan Monitoring Mandiri: Fokus diarahkan pada penguatan kapasitas operator dan pengelola keuangan dalam memantau tren deviasi secara *real-time* melalui modul pembayaran dan komitmen pada aplikasi SAKTI. Pengabdian ini akan menekankan pada kepatuhan jadwal revisi administratif sesuai siklus triwulanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
3. Penguatan Koordinasi Inter-Unit Berbasis *Early Warning System*: Pengabdian ini berfokus pada pembangunan mekanisme komunikasi "satu pintu" antara para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Hal ini mencakup pengembangan prosedur operasional standar (SOP) internal terkait peringatan dini (*early warning*) bagi unit kerja yang memiliki potensi deviasi tinggi, sehingga tindakan korektif dapat diambil sebelum batas akhir waktu revisi (H-1 akhir triwulan) terlampaui.

Melalui ketiga fokus tersebut, pengabdian ini diharapkan dapat mengeliminasi hambatan komunikasi yang selama ini menjadi penyebab utama bengkaknya nilai deviasi RPD, sehingga berdampak langsung pada kenaikan skor IKPA IAIN Parepare.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

TUJUAN PENGABDIAN

Pelaksanaan pengabdian ini diarahkan untuk mencapai beberapa target strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas kinerja anggaran institusi. Adapun tujuan mendetail dari pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Akar Masalah dan Faktor Penyebab Deviasi RPD: Tujuan pertama adalah melakukan pemetaan masalah secara komprehensif terhadap kendala-kendala teknis dan manajerial yang dihadapi oleh setiap unit kerja di IAIN Parepare. Dengan mengidentifikasi penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi belanja, pengabdian ini dapat memberikan rekomendasi solusi yang tepat sasaran dan berbasis data faktual.
2. Menghasilkan Strategi dan Formulasi Efektif dalam Peningkatan Akurasi RPD: Pengabdian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah formulasi strategis yang aplikatif dalam menyusun rencana penarikan dana, baik pada fase awal penyusunan DIPA maupun pada saat periode revisi triwulanan. Strategi ini dirancang agar mampu menjembatani kebutuhan operasional unit kerja dengan target minimalisasi deviasi yang ditetapkan oleh regulasi, sehingga setiap perubahan jadwal kegiatan dapat dipetakan secara akurat ke dalam proyeksi belanja yang lebih presisi.
3. Meningkatkan Nilai IKPA IAIN Parepare secara Signifikan: Tujuan akhir dari pengabdian ini adalah pencapaian performa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal, khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA. Dengan tercapainya akurasi RPD yang tinggi, diharapkan IAIN Parepare dapat mempertahankan reputasi sebagai satuan kerja dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, kredibel, dan disiplin di tingkat nasional.

ANALISIS STRATEGI PENGABDIAN

1. Analisis Masalah

Berdasarkan evaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya, ditemukan bahwa akar masalah rendahnya nilai IKPA IAIN Parepare bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada lemahnya sinkronisasi antara perencanaan kegiatan dan eksekusi anggaran. Masalah ini diidentifikasi melalui beberapa indikator:

- Ketidaksinkronan Data: Sering terjadi kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada Halaman III DIPA.
- Kurangnya Literasi Regulasi: Pemahaman mengenai batas waktu (*deadline*) pemutakhiran RPD pada awal triwulan belum merata di tingkat fakultas dan lembaga.
- Sistem Monitoring yang Pasif: Belum adanya sistem peringatan dini (*early warning*) yang mengingatkan pengelola unit kerja sebelum ambang batas deviasi 5% terlampaui.

2. Analisis Tujuan

Analisis tujuan dilakukan untuk mengubah "masalah" menjadi "sasaran yang harus dicapai" (*objective tree*). Target utama yang ingin diraih adalah:

- Tercapainya Disiplin Anggaran: Terwujudnya keselarasan antara kalender kegiatan akademik/non-akademik dengan proyeksi penarikan dana.
- Optimalisasi Nilai IKPA: Mengembalikan posisi indikator Deviasi Halaman III DIPA ke angka maksimal melalui akurasi proyeksi bulanan.
- Efisiensi Kas Negara: Membantu Bendahara Umum Negara dalam memprediksi kebutuhan kas secara akurat sehingga tidak terjadi *idle cash* yang tinggi.

3. Analisis Strategi Program (Model Strategi Efektif)

Strategi yang dipilih untuk mencapai target hasil pengabdian adalah Strategi Pendampingan Terpadu Berbasis *Milestone Monitoring*. Model ini dipilih karena bersifat partisipatif dan solutif terhadap dinamika anggaran di lapangan. Bukan hanya diharapkan mampu memperbaiki dokumen (Halaman III DIPA), tetapi juga memperbaiki perilaku

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

manajerial (*behavioral change*) para pemangku kepentingan di IAIN Parepare, sehingga peningkatan nilai IKPA dapat bersifat berkelanjutan. Strategi ini mencakup:

- Formulasi Pra-Penyusunan (Input): Melakukan *cleansing data* dan sinkronisasi jadwal kegiatan di seluruh unit kerja sebelum revisi DIPA triwulanan diajukan, guna memastikan angka yang diinput pada aplikasi SAKTI memiliki dasar realisasi yang kuat.
- Mekanisme Kontrol Triwulanan (Proses): Menetapkan SOP koordinasi di mana setiap unit kerja wajib melakukan konfirmasi ulang jadwal kegiatan pada minggu kedua sebelum berakhirnya bulan pertama setiap triwulan (Januari, April, Juli, dan Oktober).
- Intervensi Edukasi dan Asistensi (Output): Memberikan pendampingan teknis secara langsung kepada para pengelola keuangan unit mengenai cara membaca tren deviasi pada aplikasi SAKTI, sehingga mereka mampu melakukan mitigasi mandiri sebelum deviasi menjadi permanen.

KONSEP ATAU TEORI YANG RELEVAN

Untuk memperkuat kerangka teoritis dan praktis pengabdian ini, dilakukan telaah terhadap beberapa hasil kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan optimalisasi IKPA dan akurasi RPD:

1. Sari, N. et al. (2022) – *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian IKPA pada Satuan Kerja Kerja di Lingkungan Kemenag*
   - Resume Hasil: Kajian ini menyimpulkan bahwa variabel perencanaan (RPD) memiliki pengaruh paling dominan terhadap nilai akhir IKPA. Kegagalan mencapai nilai maksimal sering disebabkan oleh kurangnya kompetensi operator dalam melakukan estimasi belanja bulanan serta lemahnya pengawasan pimpinan terhadap progres revisi Halaman III DIPA secara periodik.
2. Prasetyo, A. (2021) – *Strategi Mitigasi Deviasi Halaman III DIPA Melalui Optimalisasi Aplikasi SAKTI*
   - Resume Hasil: Penelitian ini menekankan bahwa integrasi data antara modul komitmen dan modul pembayaran pada aplikasi SAKTI sangat krusial. Hasil kajian menunjukkan bahwa satker yang melakukan rekonsiliasi rencana kegiatan setiap bulan (bukan hanya setiap triwulan) memiliki tingkat deviasi RPD di bawah 5%, jauh lebih rendah dibanding satker yang hanya mengandalkan revisi rutin triwulanan.
3. Hidayat & Rahmawati (2023) – *Implementasi Cash Planning dalam Mewujudkan Disiplin Fiskal Satuan Kerja Pendidikan Tinggi*
   - Resume Hasil: Kajian ini menemukan adanya *gap* komunikasi yang lebar antara unit akademik (sebagai pelaksana kegiatan) dengan unit keuangan (sebagai pelaksana anggaran). Hal ini menyebabkan RPD yang disusun pada awal tahun menjadi tidak relevan karena banyaknya pergeseran kalender akademik yang tidak segera dilaporkan kepada pengelola anggaran.
4. Lestari, D. (2020) – *Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran: Perspektif Manajemen Perubahan dan Komitmen Organisasi*
   - Resume Hasil: Menunjukkan bahwa peningkatan nilai IKPA tidak cukup hanya dengan perbaikan sistem aplikasi, tetapi membutuhkan komitmen organisasi dan perubahan perilaku manajerial. Kajian ini menyarankan adanya SOP internal yang memaksa setiap unit kerja untuk bertanggung jawab atas target penyerapan yang telah mereka susun sendiri.

Berdasarkan kajian-kajian di atas, pengabdian yang dilakukan kali ini memiliki beberapa sisi penyempurnaan dan perbedaan mendasar sebagai berikut:

- Integrasi Hulu-Hilir: Jika kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek teknis aplikasi SAKTI atau kompetensi operator secara sempit, pengabdian ini menyempurnakannya dengan pendekatan intervensi manajerial yang utuh. Pengabdian ini tidak hanya

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

memperbaiki cara penginputan data, tetapi membangun sistem koordinasi dari tingkat unit kerja (fakultas/lembaga) hingga ke birokrasi keuangan institut.

- Formulasi Strategi Dua Arah: Pengabdian ini menawarkan formulasi strategi yang lebih dinamis, di mana akurasi RPD dijaga sejak tahap penyusunan awal DIPA hingga mekanisme revisi triwulanan yang didampingi secara langsung. Ini menutup celah "lemahnya sinkronisasi" yang ditemukan pada kajian Hidayat & Rahmawati (2023).
- Output Berupa Model Kebijakan Internal: Selain peningkatan nilai angka IKPA, pengabdian ini diarahkan untuk menghasilkan output berupa draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Anggaran di IAIN Parepare. Hal ini merupakan upaya penyempurnaan atas saran dari kajian Lestari (2020), agar keberhasilan peningkatan akurasi RPD tidak bersifat momentum saja, melainkan menjadi sistem yang berkelanjutan (*sustainable system*).

METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) atau Penelitian Tindakan Partisipatif. Metode ini merupakan desain penelitian yang secara simultan menyelidiki masalah sosial (dalam hal ini kinerja anggaran) dan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikannya secara kolaboratif.

1. Tahapan Pelaksanaan (Siklus PAR)

Pengabdian ini dilakukan melalui siklus berkesinambungan yang terdiri dari empat tahapan utama:

- Refleksi Awal (Diagnosis): Melakukan audit internal dan wawancara mendalam dengan operator SAKTI serta PPK di IAIN Parepare untuk memetakan alasan spesifik mengapa deviasi RPD selalu melampaui 5%. Tahap ini bertujuan menemukan "penyakit" utama, apakah pada aspek kompetensi SDM, kendala birokrasi, atau kesalahan teknis pada sistem.
- Perencanaan Tindakan (Action Planning): Menyusun formulasi strategi baru, seperti pembuatan draf SOP koordinasi antar-unit dan jadwal tetap (*fixed schedule*) untuk rekonsiliasi rencana kegiatan sebelum batas akhir revisi triwulanan.
- Pelaksanaan Tindakan (Taking Action): Mengimplementasikan strategi tersebut melalui pendampingan langsung (*asistensi*). Pengabdi terjun langsung membantu unit kerja dalam menyinkronkan kalender akademik dengan modul komitmen di aplikasi SAKTI.
- Evaluasi dan Refleksi (Evaluating): Menganalisis hasil intervensi dengan membandingkan nilai indikator deviasi RPD sebelum dan sesudah pendampingan. Jika masih ditemukan deviasi, dilakukan modifikasi strategi untuk siklus triwulan berikutnya.

2. Mengapa Metode PAR Paling Tepat?

Pemilihan metode PAR didasarkan pada beberapa alasan strategis:

- Sifat Masalah yang Dinamis: Masalah deviasi RPD di IAIN Parepare bukan hanya masalah angka, melainkan masalah perilaku organisasi. PAR memungkinkan pengabdi untuk mengubah budaya kerja pelaksana kegiatan agar lebih peduli terhadap dampak administratif dari setiap pergeseran jadwal kegiatan.
- Kolaborasi dan Kepemilikan (Ownership): Dalam PAR, pengelola keuangan dan unit kerja tidak diposisikan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai mitra. Hal ini penting agar strategi yang dihasilkan nantinya tidak dianggap sebagai "beban baru", tetapi sebagai solusi yang mereka ikut rumuskan, sehingga keberlanjutan (*sustainability*) program terjamin.
- Solusi Berbasis Realitas (Context-Specific): Setiap satker memiliki karakteristik unik. Dengan PAR, strategi peningkatan keakuratan RPD yang dihasilkan akan sangat spesifik menyesuaikan dengan pola kerja di IAIN Parepare, bukan sekadar teori umum yang diambil dari buku teks.
- Hasil yang Instan dan Terukur: Karena metode ini berbasis tindakan (*action*), keberhasilannya dapat langsung dilihat pada nilai IKPA di periode berjalan. Ini

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

memberikan umpan balik cepat bagi institusi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Dokumentasi: Mengambil data laporan IKPA dari Aplikasi OMSPAN.
- FGD (Focus Group Discussion): Mendiskusikan kendala teknis dengan para pemangku kepentingan.
- Observasi Partisipatif: Mengamati secara langsung proses penginputan dan revisi RPD pada aplikasi SAKTI selama masa pengabdian

Tabel 1. Matriks Perencanaan Operasional Pengabdian

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tujuan	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Identifikasi Masalah	Observasi, wawancara, analisis kebutuhan (needs assessment)	Mengidentifikasi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan RPD	Data awal permasalahan	Tersusunnya peta masalah dan kebutuhan	Minggu 1	Tim Pengabdi
2	Perencanaan Program	Penyusunan materi, modul, dan strategi pendampingan	Menyusun desain kegiatan yang sesuai kebutuhan	Modul pelatihan dan rencana kerja	Tersusunnya dokumen perencanaan program	Minggu 1	Tim Pengabdi
3	Sosialisasi	Penyampaian tujuan dan manfaat kegiatan kepada peserta	Meningkatkan pemahaman awal peserta	Peserta memahami urgensi RPD	Tingkat partisipasi peserta tinggi	Minggu 2	Tim & Mitra
4	Pelatihan Teknis	Pemberian materi terkait konsep dan penyusunan RPD	Meningkatkan pengetahuan peserta	Peningkatan pemahaman konsep RPD	Peserta mampu menjelaskan RPD	Minggu 2	Narasumber
5	Pendampingan Intensif	Praktik langsung penyusunan RPD (learning by doing)	Meningkatkan keterampilan teknis peserta	Dokumen RPD yang disusun peserta	Peserta mampu menyusun RPD	Minggu 3–4	Tim Pengabdi
6	Penguatan Koordinasi	Diskusi lintas unit dan sinkronisasi program	Meningkatkan sinergi antar unit kerja	Keselarasan perencanaan anggaran	Koordinasi antar unit meningkat	Minggu 4	Tim & Mitra
7	Implementasi	Penerapan	Mengopti	Realisas	Terjadi	Minggu	Mitra

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

		RPD dalam kegiatan keuangan	malkan serapan anggaran	i anggaran sesuai rencana	peningkatan serapan anggaran	5	
8	Monitoring	Pemantauan pelaksanaan RPD	Mengontrol keberjalanan program	Laporan monitoring	Kesesuaian antara rencana dan realisasi	Minggu 5	Tim Pengabdi
9	Evaluasi	Evaluasi hasil kegiatan dan dampaknya	Menilai efektivitas program	Laporan evaluasi	Peningkatan kapasitas dan kinerja	Minggu 6	Tim Pengabdi
10	Pelaporan	Penyusunan laporan akhir pengabdian	Mendokumentasikan hasil kegiatan	Laporan pengabdian	Laporan tersusun dengan baik	Minggu 6	Tim Pengabdi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

1. Identifikasi Permasalahan Keakuratan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa salah satu persoalan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan IAIN Parepare adalah belum optimalnya kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis penginputan anggaran, tetapi juga berhubungan dengan proses perencanaan kegiatan, koordinasi antarunit kerja, dan kedisiplinan dalam melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD). Kondisi ini mengindikasikan bahwa akurasi RPD membutuhkan keterlibatan seluruh unit kerja, terutama fakultas, lembaga, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pengelola keuangan.

Berdasarkan analisis permasalahan, terdapat tiga faktor yang memengaruhi terjadinya deviasi RPD. Pertama, ketidaksinkronan antara kalender kegiatan akademik dan nonakademik dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam Halaman III DIPA. Kedua, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak segera diikuti dengan penyesuaian administrasi anggaran. Ketiga, belum optimalnya pemahaman dan kedisiplinan pengelola unit kerja dalam melakukan pemutakhiran RPD sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Ketiga faktor tersebut memperlihatkan bahwa persoalan deviasi RPD merupakan kombinasi antara kelemahan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

Temuan identifikasi tersebut menjadi dasar dalam merancang strategi pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga penguatan tata kelola keuangan secara kelembagaan. Dengan demikian, intervensi pengabdian diarahkan pada pembentukan pola kerja yang lebih terintegrasi antara unit pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan informasi antara kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan proyeksi penarikan dana.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Pengelola Keuangan

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kapasitas pengelola keuangan mengenai pentingnya akurasi RPD dalam mendukung pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hubungan antara perencanaan kegiatan, jadwal penarikan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dana, realisasi belanja, serta konsekuensi deviasi terhadap penilaian kinerja anggaran satuan kerja. Sosialisasi juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran bahwa penyusunan RPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari proses pengendalian keuangan institusi.

Penguatan kapasitas dilanjutkan melalui pelatihan teknis mengenai konsep penyusunan RPD dan pemanfaatan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Materi pelatihan difokuskan pada pemahaman keterkaitan antara rencana kegiatan dengan proyeksi kebutuhan dana, pembacaan perkembangan pelaksanaan anggaran, serta pentingnya melakukan penyesuaian terhadap perubahan jadwal kegiatan. Penguasaan aspek teknis tersebut menjadi kebutuhan penting agar pengelola keuangan dapat melakukan identifikasi dini terhadap potensi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penarikan dana.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, strategi pengabdian menempatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai salah satu instrumen penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran. Penguatan kapasitas tersebut juga diarahkan untuk membangun kesamaan pemahaman antarunit kerja mengenai tanggung jawab masing-masing dalam menjaga konsistensi RPD. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya bergantung pada operator keuangan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unit yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan institusi.

3. Pendampingan Penyusunan RPD dan Optimalisasi Aplikasi SAKTI

Pendampingan intensif merupakan tahapan utama dalam pelaksanaan strategi peningkatan keakuratan RPD di IAIN Parepare. Pada tahap ini, pengelola keuangan memperoleh pendampingan teknis dalam menyusun dan menyesuaikan rencana penarikan dana berdasarkan kebutuhan aktual kegiatan. Pendekatan yang digunakan adalah *learning by doing*, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami sekaligus mempraktikkan proses penyusunan RPD berdasarkan kalender kegiatan dan proyeksi kebutuhan anggaran masing-masing unit kerja.

Pendampingan tersebut menekankan pentingnya kesesuaian antara jadwal kegiatan dengan proyeksi penarikan dana bulanan. Setiap perubahan jadwal kegiatan perlu dikomunikasikan kepada bagian perencanaan dan keuangan agar dapat dipertimbangkan dalam proses pemutakhiran RPD. Dalam konteks ini, aplikasi SAKTI berfungsi sebagai instrumen pendukung pengelolaan dan pemantauan informasi anggaran, sehingga data perencanaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi deviasi dan menentukan langkah korektif.

Selain penguatan aspek teknis, pendampingan juga diarahkan pada peningkatan ketelitian dan tanggung jawab pengelola anggaran dalam melakukan pencatatan serta pemutakhiran data. Hal ini penting karena akurasi RPD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga oleh kualitas informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Apabila perubahan kebutuhan kegiatan tidak segera diperbarui dalam perencanaan, maka ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi penarikan dana tetap berpotensi terjadi.

Dengan demikian, hasil penting dari tahapan pendampingan ini adalah terbentuknya kerangka kerja penyusunan RPD yang mengintegrasikan perencanaan kegiatan, kebutuhan pembiayaan, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan. Kerangka tersebut menjadi landasan bagi pengelola keuangan untuk melakukan perencanaan yang lebih terukur dan responsif terhadap perubahan kegiatan.

4. Penguatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan RPD

Hasil pengabdian juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarunit kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi RPD. Koordinasi dilakukan dengan mendorong komunikasi yang lebih intensif antara fakultas, lembaga, unit pelaksana kegiatan, PPK, serta bagian perencanaan dan keuangan. Komunikasi tersebut diperlukan agar setiap

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

perubahan jadwal kegiatan maupun kebutuhan pembiayaan dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara administratif sebelum memengaruhi realisasi penarikan dana.

Penguatan koordinasi diarahkan pada pembentukan mekanisme komunikasi yang terstruktur melalui konfirmasi jadwal kegiatan dan rekonsiliasi rencana penarikan dana secara berkala. Mekanisme ini menjadi dasar untuk mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap unit kerja yang memiliki potensi deviasi. Dengan adanya mekanisme tersebut, pengelola keuangan dapat melakukan identifikasi permasalahan lebih awal dan menyusun tindakan korektif sebelum periode pemutakhiran RPD berakhir.

Tahapan monitoring dilakukan untuk mengamati kesesuaian antara rencana penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi diarahkan pada beberapa aspek, yaitu konsistensi kalender kegiatan, ketepatan pemutakhiran RPD, koordinasi antarunit, serta kemampuan pengelola keuangan dalam memanfaatkan informasi pada aplikasi SAKTI. Hasil monitoring menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan pengendalian anggaran pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pengabdian menghasilkan rancangan strategi peningkatan keakuratan RPD yang mencakup identifikasi masalah, penguatan kapasitas, pendampingan teknis, koordinasi lintas unit, serta monitoring dan evaluasi. Strategi tersebut memberikan arah bagi pengembangan tata kelola perencanaan kas yang lebih sistematis di lingkungan IAIN Parepare. Namun, pengukuran efektivitas strategi terhadap peningkatan skor IKPA dan penurunan persentase deviasi masih memerlukan dukungan data kuantitatif hasil evaluasi sebelum dan sesudah intervensi.

Pembahasan

1. Akurasi RPD sebagai Instrumen Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Temuan pengabdian menunjukkan bahwa akurasi RPD memiliki kedudukan strategis dalam menentukan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan perguruan tinggi. RPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif yang memuat proyeksi penarikan dana, tetapi juga menjadi instrumen untuk menghubungkan perencanaan kegiatan dengan kebutuhan likuiditas dan realisasi belanja. Ketika jadwal penarikan dana tidak disusun berdasarkan kebutuhan aktual kegiatan, maka ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi berpotensi meningkatkan deviasi serta memengaruhi capaian indikator IKPA.

Dalam perspektif manajemen keuangan publik, kualitas pengelolaan anggaran tidak cukup diukur berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga perlu memperhatikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Bastian (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, akurasi RPD merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran institusi pendidikan tinggi.

Temuan ini juga sejalan dengan kajian Sari dkk. (2022) yang menempatkan aspek perencanaan sebagai salah satu faktor penting dalam pencapaian nilai IKPA. Ketidakakuratan estimasi kebutuhan belanja bulanan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas operator dan pengawasan secara berkala. Dalam konteks IAIN Parepare, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan nilai IKPA harus dimulai dari pembenahan proses perencanaan, bukan hanya melalui upaya memperbaiki administrasi pada akhir periode pelaksanaan anggaran.

Oleh karena itu, strategi peningkatan akurasi RPD perlu diposisikan sebagai bagian dari sistem pengendalian kinerja anggaran institusi. Orientasi pengelolaan keuangan harus bergeser dari sekadar memenuhi ketentuan administratif menuju pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan kegiatan, ketepatan waktu, dan keterukuran realisasi. Pergeseran tersebut menjadi penting agar peningkatan kualitas IKPA tidak bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari budaya pengelolaan keuangan institusi.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

2. Sinkronisasi Kalender Kegiatan dan Perencanaan Kas Institusi

Salah satu temuan penting dalam pengabdian ini adalah adanya persoalan sinkronisasi antara kalender kegiatan akademik dan nonakademik dengan perencanaan penarikan dana. Perubahan jadwal kegiatan yang tidak segera dikomunikasikan kepada pengelola keuangan menyebabkan proyeksi kebutuhan dana menjadi kurang relevan dengan kondisi aktual. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RPD membutuhkan keterpaduan informasi antara unit yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan unit yang bertanggung jawab terhadap administrasi anggaran.

Dalam perspektif *cash planning*, perencanaan kas harus didasarkan pada estimasi waktu dan jumlah kebutuhan dana yang realistis. Hidayat dan Rahmawati (2023) menegaskan bahwa kesenjangan komunikasi antara unit akademik dan unit keuangan dapat menyebabkan rencana penarikan dana kehilangan relevansinya akibat perubahan kalender kegiatan. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan kondisi yang diidentifikasi dalam pengabdian di IAIN Parepare, terutama berkaitan dengan belum optimalnya koordinasi dalam menyampaikan perubahan jadwal kegiatan.

Sinkronisasi kalender kegiatan dengan RPD karena itu harus dilakukan sejak tahap perencanaan awal. Setiap unit kerja perlu menyusun proyeksi kegiatan berdasarkan jadwal yang telah disepakati, kemudian mengomunikasikan kebutuhan pembiayaan kepada bagian perencanaan dan keuangan. Apabila terjadi perubahan jadwal, informasi tersebut harus segera diperbarui agar tidak menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi penarikan dana.

Strategi ini memperlihatkan bahwa perencanaan kas bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian keuangan, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh unit kerja. Fakultas dan lembaga memiliki informasi mengenai kebutuhan serta waktu pelaksanaan kegiatan, sedangkan bagian keuangan memiliki kewenangan dan kapasitas administratif untuk mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam perencanaan anggaran. Sinergi keduanya menjadi prasyarat penting bagi terciptanya perencanaan kas yang akurat dan akuntabel.

3. Optimalisasi Aplikasi SAKTI dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan aplikasi SAKTI menjadi salah satu aspek penting dalam strategi peningkatan keakuratan RPD. Sistem informasi keuangan memungkinkan pengelola anggaran mengakses dan mengelola informasi yang berkaitan dengan perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Namun, keberadaan sistem digital tidak secara otomatis menjamin akurasi data apabila tidak disertai kemampuan teknis, ketelitian, dan kedisiplinan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Prasetyo (2021) menjelaskan pentingnya integrasi informasi dalam aplikasi SAKTI, terutama melalui keterkaitan antara modul komitmen dan modul pembayaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan informasi anggaran perlu dilakukan secara konsisten agar perencanaan penarikan dana dapat disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pengabdian ini, pendampingan teknis menjadi intervensi yang relevan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan dalam membaca informasi dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian RPD.

Akan tetapi, optimalisasi aplikasi SAKTI tidak boleh dimaknai hanya sebagai peningkatan keterampilan teknis operator. Aspek yang lebih mendasar adalah membangun kemampuan analitis pengelola keuangan dalam menerjemahkan informasi kegiatan menjadi proyeksi kebutuhan dana yang realistis. Operator perlu memahami alasan perubahan jadwal kegiatan, pola realisasi belanja, serta konsekuensi administratif dari keterlambatan pemutakhiran data. Dengan demikian, penggunaan aplikasi dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik membutuhkan integrasi antara teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi. Sistem aplikasi berperan menyediakan instrumen pengelolaan informasi,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

sedangkan sumber daya manusia menentukan kualitas data dan ketepatan tindakan yang diambil. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas operator dan pengelola keuangan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, asistensi, dan evaluasi berkala.

4. Penguatan Koordinasi Antarunit melalui Mekanisme Early Warning System

Persoalan deviasi RPD yang ditemukan dalam pengabdian ini juga memperlihatkan pentingnya koordinasi organisasi dalam pengelolaan keuangan publik. Ketika informasi mengenai perubahan kegiatan tidak disampaikan secara tepat waktu, bagian keuangan akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian proyeksi penarikan dana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang mampu memastikan setiap unit kerja memiliki tanggung jawab terhadap kesesuaian rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran.

Salah satu strategi yang ditawarkan adalah pengembangan mekanisme *early warning system*. Mekanisme ini diarahkan untuk memberikan peringatan kepada unit kerja apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara jadwal kegiatan dan proyeksi penarikan dana. Sistem peringatan dini memungkinkan pengelola keuangan melakukan langkah antisipatif sebelum deviasi berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut perlu didukung oleh pemantauan berkala, komunikasi satu pintu, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antara PPK, bagian perencanaan dan keuangan, serta unit pelaksana kegiatan.

Strategi ini memiliki relevansi dengan pandangan Lestari (2020) mengenai pentingnya komitmen organisasi dan perubahan perilaku manajerial dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran. Perbaikan sistem administrasi tidak akan memberikan hasil optimal apabila setiap unit kerja tidak memiliki komitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pengembangan *early warning system* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana membangun disiplin organisasi dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks IAIN Parepare, mekanisme tersebut dapat diperkuat melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi anggaran. SOP diperlukan untuk mengatur mekanisme penyampaian perubahan kegiatan, jadwal rekonsiliasi RPD, penanggung jawab pemutakhiran data, dan prosedur tindak lanjut apabila ditemukan potensi deviasi. Keberadaan SOP akan membantu memastikan bahwa koordinasi tidak hanya bergantung pada komunikasi informal, tetapi menjadi bagian dari sistem kerja kelembagaan yang terstruktur.

5. Model Strategi Terpadu untuk Keberlanjutan Peningkatan Nilai IKPA

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis, peningkatan keakuratan RPD di IAIN Parepare membutuhkan strategi yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dimensi perencanaan menekankan sinkronisasi kalender kegiatan dengan kebutuhan penarikan dana. Dimensi pelaksanaan berorientasi pada peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan optimalisasi aplikasi SAKTI. Sementara itu, dimensi pengendalian diarahkan pada penguatan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penerapan mekanisme peringatan dini.

Ketiga dimensi tersebut membentuk pendekatan pengelolaan RPD yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pola yang hanya menitikberatkan pada pemutakhiran dokumen anggaran secara administratif. Dalam pendekatan terpadu, akurasi RPD dibangun sejak tahap perencanaan kegiatan, dijaga melalui pemantauan pelaksanaan anggaran, dan diperbaiki melalui evaluasi berkala. Dengan demikian, setiap perubahan kebutuhan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui koordinasi antara unit pelaksana dan pengelola keuangan.

Kontribusi utama pengabdian ini terletak pada formulasi strategi pendampingan terpadu berbasis *milestone monitoring*yang menghubungkan aspek teknis pengelolaan anggaran dengan perubahan perilaku organisasi. Strategi ini memberikan kerangka operasional bagi IAIN Parepare untuk mengembangkan tata kelola perencanaan kas yang

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

lebih responsif, partisipatif, dan akuntabel. Berbeda dengan pendekatan yang hanya berorientasi pada kemampuan operator atau penggunaan aplikasi, model ini menempatkan koordinasi antarunit sebagai fondasi keberhasilan peningkatan akurasi RPD.

Dengan demikian, keberlanjutan strategi peningkatan IKPA perlu didukung oleh komitmen pimpinan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, konsistensi penggunaan aplikasi SAKTI, serta penerapan SOP koordinasi anggaran. Meskipun demikian, efektivitas model ini dalam menurunkan deviasi RPD dan meningkatkan nilai IKPA perlu dibuktikan melalui pengukuran kuantitatif secara periodik. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana perubahan mekanisme kerja yang diterapkan benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pelaksanaan anggaran institusi.

SIMPULAN

Pengabdian mengenai strategi peningkatan keakuratan Rencana Penarikan Dana (RPD) di IAIN Parepare menunjukkan bahwa persoalan deviasi RPD berkaitan erat dengan ketidaksinkronan kalender kegiatan, perubahan jadwal yang tidak segera diikuti pemutakhiran administrasi anggaran, serta belum optimalnya koordinasi dan kapasitas pengelola keuangan. Upaya perbaikan dilakukan melalui strategi pendampingan terpadu yang mencakup identifikasi masalah, sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan penyusunan RPD, optimalisasi aplikasi SAKTI, serta penguatan koordinasi dan monitoring antarunit kerja. Strategi ini menegaskan bahwa akurasi RPD tidak hanya bergantung pada ketepatan penginputan data, tetapi juga membutuhkan keterpaduan perencanaan kegiatan, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran.

Kontribusi pengabdian ini terletak pada pengembangan strategi pengelolaan RPD berbasis *milestone monitoring* dan koordinasi lintas unit yang diarahkan untuk mendukung peningkatan nilai IKPA secara berkelanjutan. Implementasi strategi tersebut perlu diperkuat melalui penyusunan SOP koordinasi anggaran, penerapan mekanisme *early warning system*, serta evaluasi berkala terhadap kesesuaian rencana dan realisasi penarikan dana. Dengan demikian, pengelolaan anggaran di IAIN Parepare diharapkan berkembang menjadi lebih terencana, responsif, dan akuntabel. Pengukuran dampak melalui perbandingan data deviasi RPD dan nilai IKPA sebelum serta sesudah pendampingan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas strategi dan menjadi dasar pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan institusi pada periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A., dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama RI.

Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi 3). Erlangga.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-155/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Tingkat Satuan Kerja*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2024). *Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fitriyani, A., & Heru, K. (2022). Analisis Strategi Mitigasi Deviasi Halaman III DIPA dalam Upaya Peningkatan Nilai IKPA. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(1), 45-60.

Halim, A., & Kusufi, S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Salemba Empat.

Hidayat, R., & Rahmawati, S. (2023). Implementasi Cash Planning dalam Mewujudkan Disiplin Fiskal Satuan Kerja Pendidikan Tinggi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga*.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*.

Lestari, D. (2020). Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran: Perspektif Manajemen Perubahan dan Komitmen Organisasi. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Negara*, 4(2), 112-128.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

Prasetyo, A. (2021). Strategi Mitigasi Deviasi Halaman III DIPA Melalui Optimalisasi Aplikasi SAKTI. *Internal Control Journal*, 3(1), 15-29.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Sari, N., dkk. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capaian IKPA pada Satuan Kerja Kerja di Lingkungan Kementerian Agama. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2).

Wicaksono, M. (2024). Transformasi Digital melalui Aplikasi SAKTI dalam Meningkatkan Akurasi Rencana Penarikan Dana. *Jurnal Kebijakan Publik Nasional*, 2(1), 88-102.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923